

Media Lokal dan Suara Desa: Analisis Isi Surat Kabar Lokal Online di Kabupaten Banyumas¹

Lisa Lindawati

Abstrak/Abstract

Desa merupakan entitas penting di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar wilayah Indonesia adalah desa. Sejauh ini isu desa belum menjadi perhatian sebagian besar media, termasuk media lokal yang notabene dekat dengan entitas desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi. Objek penelitian adalah dua surat kabar lokal online yang berbasis di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu Radar Banyumas dan Satelit Post dalam rentang waktu 1 tahun (Maret 2013 -Maret 2014). Dari hasil penelitian, tercermin bahwa media sibuk dengan isu besar yang cenderung "Jakarta Sentris". Jikalau diberitakan, desa ditempatkan sebagai komunitas yang inferior dan termarginalkan. Isu tentang Desa seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, peristiwa bencana, dan juga kemiskinan. Padahal, ada banyak sisi lain dari desa yang dapat ditonjolkan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Desa. Perlu sinergitas antara desa dengan media dalam membangun wacana positif tentang Desa. Peluangnya, meskipun dalam produk yang dihasilkan oleh media belum mencerminkan sinergitas tersebut, ada komitmen yang diutarakan redaksi untuk lebih memperhatikan desa dalam pemberitaannya.

Village is an important entity in Indonesia. The reason is Indonesia mostly comprises rural areas. So far most media outlets, including local media that are in fact in close proximity to villages, lack interest in the issue of village. This research used the content analysis method. The study was conducted on two local online newspapers based in Banyumas regency, namely Radar Banyumas and Satellite Post within a span of 1 year (March 2013-March 2014). The research found the media tend to be Jakarta-centered as they were busy with big issues that were happening in the capital city. When covered, villages are treated as inferior and marginalized communities. The issue of village is often associated with crime, disasters and poverty, whereas there are lots of other sides of the village that the media can promote to spur rural development. Synergy between villages and the media to build a constructive discourse about village is imperative. Although the products of the media have not yet reflected the synergy, there is commitment from the editors to paying more attention to village affairs.

Kata kunci/keywords:

Desa, pemberdayaan, berita, lokal, surat kabar, analisis isi

Village, empowerment, news, local, newspaper, content analysis

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

lisalinda@ugm.ac.id

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kesempatan yang sama bagi setiap entitas untuk memegang kendali atas informasi. Hanya saja, tidak semua entitas mempunyai kekuatan yang sama dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Peran media arus utama tetap memegang kunci dalam membangun wacana publik. Di tengah hiruk pikuk informasi yang diproduksi oleh berbagai sumber, media arus utama hingga saat ini belum kehilangan kekuatannya dalam mem-

¹Artikel ini dikembangkan dari makalah yang dipresentasikan dalam The 1st Indonesia Media Research Awards and Summit (1st IMRAS) tahun 2014.

bentuk agenda publik. Media memang tidak lagi dianggap dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat secara langsung tetapi media mampu untuk menentukan apa yang sebaiknya dipikirkan.

Kekuatan media sebagai pembentuk agenda publik sangat erat kaitannya dengan *frame building*, yaitu bagaimana media memilih bingkai tertentu untuk menyajikan sebuah isu (Kim, *et.al*, 2010). Dengan mekanisme ini, media mempunyai kekuatan untuk membingkai suatu peristiwa dengan menonjolkan suatu hal dan menghilangkan hal lainnya. Di satu sisi, kekuatan ini membantu masyarakat untuk menentukan prioritas permasalahan yang harus dipikirkan dan kemudian diselesaikan. Media berperan sebagai cermin sekaligus kaca pembesar yang memudahkan masyarakat untuk memahami keadaan (Sambandan, 2002:56). Namun, disisi yang lain, media juga dapat menyebabkan hal yang sebenarnya krusial menjadi tidak muncul karena minimnya koverasi terhadap isu tersebut. Salah satunya adalah isu mengenai desa.

Desa merupakan entitas penting di Indonesia. Pasalnya, mayoritas wilayah Indonesia adalah Desa². Ada setidaknya 76.800 Desa³ yang saat ini menempati wilayah Indonesia. Sayangnya, banyaknya wilayah desa belum sejahtera. Hingga saat ini desa masih menjadi basis permasalahan sosial, terutama kemiskinan. Hingga Maret 2014 (BPS, 2014), tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 11,25%. Setidaknya 28,28 juta jiwa penduduk masuk dalam kategori miskin. Dari keseluruhan jumlah penduduk miskin, lebih dari separuhnya tinggal di wilayah pedesaan (mencapai 17.77 juta jiwa). Sedangkan sisanya (berkisar 10.51 juta jiwa) tinggal di perkotaan.

Penduduk miskin, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, menjadi entitas yang sudah selayaknya mendapat prioritas perhatian. Menurut UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemiskinan merupakan salah satu kriteria kerentanan sosial, disamping keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan, korban bencana, kekerasan, eksploitasi, dan juga diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan UU HAM No 39 tahun 1999 yang juga memasukkan kategori fakir miskin sebagai kelompok masyarakat rentan disamping anak, lansia, penyandang cacat, dan wanita hamil. Dengan demikian, kelompok ini sudah

² Istilah di sini juga merujuk pada entitas lain yang mempunyai karakter sama dengan Desa, seperti gampong di Aceh, Banjar di Bali, Nagari di Sumatera Barat, dan sebutan lain di wilayah lain pula. Pemilihan kata Desa di sini berdasar pertimbangan kepopuleran istilah saja, bukan bermaksud untuk memarginalkan istilah lainnya. Istilah Desa juga yang paling sering digunakan dalam naskah hukum.

³ Jumlah ini diambil dari http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=Desa-kodepos. Penulis kesulitan untuk menemukan data jumlah desa yang pasti dari berbagai situs resmi pemerintah.

selayaknya mendapat prioritas peningkatan kesejahteraan sosial. Mengingat basis kemiskinan ada di wilayah Desa, dapat dikatakan bahwa Membangun Desa dianggap sama halnya dengan mengatasi separuh masalah kemiskinan di Indonesia⁴.

Merujuk pada UU No 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spirituil, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan apa yang sering disebut sebagai Pemberdayaan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tataran konsep, pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan), merujuk pada setidaknya dua pengertian, yaitu *to give or authority to* dan *to give ability to or enable*. Sayangnya, selama ini desa diposisikan sebagai objek pembangunan alih-alih sebagai subjek seperti yang diharapkan dalam pemberdayaan itu sendiri. Desa seringkali ditempatkan sebagai penerima pasif program pembangunan tanpa terlibat dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Bahkan dalam berbagai program yang 'berjudul' pemberdayaan sekalipun.

Keprihatinan akan kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk menginisiasi Undang-Undang Desa sebagai bentuk perubahan *mindset* terhadap pembangunan desa. Undang-undang yang akhirnya disahkan pada awal tahun 2014 ini merupakan cermin komitmen pemerintah untuk menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Salah satu hal yang menarik dari UU Desa ini adalah adanya pasal yang mewajibkan desa mempunyai Sistem Informasi Desa (SID). Nomenklatur ini mencerminkan kesadaran pemerintah untuk menempatkan informasi sebagai sumber daya vital bagi pembangunan Desa. Terkait konsep pemberdayaan, setidaknya ada beberapa elemen penting yang harus dijamin (Salim, 2002), yaitu (1) akses, (2) partisipasi, (3) kontrol, dan (4) kesetaraan. Dalam upaya pemberdayaan perlu diperhatikan tiga hal, yaitu (1) jaringan sosial, (2) kohesivitas sosial, dan (3) agen perubahan. Dalam masyarakat informasi, aspek informasi dan komunikasi menjadi penting. Kedua elemen ini menjadi dua hal yang inheren dalam masyarakat, dimana informasi menjadi sumber daya vital yang meningkatkan kualitas kehidupan. Terkait dengan kemampuan tersebut, salah satu elemen yang menjadi indikator sebuah komunitas berdaya adalah mereka dapat mengendalikan representasi dirinya dihadapan khalayak luas. Komunitas tersebut mempunyai kekuatan untuk menentukan bagaimana mereka ingin dilihat.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu

⁴<http://gerbangtani.files.wordpress.com/2010/10/urgensi-uu-perDesaan.pdf>

wilayah yang menarik untuk diamati Sejak tahun 2011, di wilayah ini muncul gerakan kolektif yang menyebut dirinya sebagai “Gerakan Desa Membangun”. Istilah “Desa Membangun” menjadi antitesis dari istilah “Membangun Desa” yang selama ini muncul. Dalam istilah “Desa Membangun”, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek pasif yang harus dibantu atau dibangun. Gerakan ini merupakan jejaring antar desa, bersama dengan beberapa NGO, untuk menguatkan daya tawar desa di hadapan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mendorong lahirnya UU Desa⁵. Menariknya, jejaring ini memanfaatkan TIK untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh jejaring Gerakan Desa Membangun (GDM) dengan TIK adalah mengembangkan Portal Desa. Keberadaan portal yang dikelola oleh desa bertujuan untuk *mainstreaming* informasi pedesaan yang selama ini kurang diminati oleh masyarakat luas bahkan cenderung terabaikan. Di sini, masyarakat desa tidak dibiarkan menjadi konsumen informasi tetapi didorong untuk memproduksi informasi. Masyarakat desa didorong untuk menjadi jurnalis warga. Pasalnya, komunitas desa, terutama desa yang bergabung dalam GDM menganggap bahwa pemberitaan media tentang desa seringkali tidak sesuai dengan kondisi desa. Sayangnya, keberadaan media warga melalui produk jurnanisme warga belum mampu membangun wacana arus utama⁶.

⁵Pada tahun 2011-2012 penulis melakukan penelitian mengenai Gerakan Desa Membangun sebagai tugas akhir (tesis) studi Master di Prodi S2 Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM. Hasil penelitian tersebut pernah dipresentasikan dan dimuat dalam *Proceeding The 22nd Annual AMIC Conference Tahun 2013* dengan Judul “Development Communication and Village Self-Dependence (A Case Study on the Usage of ‘Village Portal’ and ‘Village-Partnership System’ to Establish Village Self-Dependence in the Village-to-Develop Movement (Gerakan Desa Membangun) at Banyumas Regency of Central Java Province in 2011-2012”.

⁶Pada tahun 2012-2013 penulis melakukan penelitian lanjutan mengenai Penggunaan Portal Desa dalam Gerakan Desa Membangun dengan judul “Desa Bersuara: Studi Kasus Praktik Jurnalisme Warga dengan Memanfaatkan Media Baru di Wilayah Banyumas tahun 2012-2013 sebagai Upaya Mendorong Desa Bersuara. Village Voiced, Village Empowered: A Case Study of the Citizen Journalism Practice Using New Media as a Medium of Empowering the Villagers at Banyumas Regency in 2012-2013”. Hasil dari penelitian ini telah dipresentasikan dalam Konferensi ASPIKOM tahun 2014 dan diterbitkan dalam *proceeding* berbentuk buku kumpulan artikel berjudul *New Media dan Arus Demokratisasi*. Versi Bahasa Inggris dari makalah ini juga telah dipresentasikan secara virtual dalam *The Asian Conference on Media & Mass Communication 2014* yang diselenggarakan di Osaka Jepang dan dipublikasikan dalam *Official Proceeding* yang dapat diakses secara online di www.iafor.org.

Ada dua kecenderungan yang menjadi kegelisahan desa selama ini terkait dengan pemberitaan media arus utama. Pertama, pemberitaan media cenderung “Jakarta-Sentris”. Istilah ini merujuk pada pendapat bahwa media selama ini lebih banyak mengangkat permasalahan di Ibu Kota Jakarta. Isu-isu daerah kurang mendapat perhatian serius. Apalagi pemberitaan mengenai Ibu Kota selalu dikaitkan dengan aspek politik. Kedua, pemberitaan media arus utama memarginalkan keberadaan desa. Pemberitaan mengenai desa seringkali hanya menyangkut hal-hal yang berbau negatif. Desa akan diberitakan oleh media jika membahas masalah kemiskinan, kriminalitas, atau peristiwa bencana. Desa direpresentasikan sebagai komunitas yang tidak berdaya. Meskipun tidak berarti bahwa pemberitaan tersebut tidak benar, citra mengenai desa ditampilkan dengan tidak seimbang.

Di balik keadaan tersebut, desa mempunyai potensi yang besar. Media mempunyai peran strategis dalam mendorong perkembangan masyarakat. Terkait dengan kekuatan tersebut, menjadi penting untuk memikirkan peran media arus utama dalam memberdayakan komunitas desa. Salah satunya dengan melakukan *mainstreaming* isu desa untuk menarik perhatian para pemegang kebijakan. Diperlukan elaborasi lebih lanjut mengenai sinergi antara media rakyat (media komunitas) dengan media arus utama dalam melakukan *mainstreaming* wacana desa. Media arus utama dapat diposisikan sebagai penguat wacana yang diproduksi oleh desa. Dengan demikian, kekuatan desa untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan publik semakin besar.

Untuk menemukan model sinergi yang tepat, penulis melakukan penelitian awal untuk memetakan kekurangan sekaligus peluang media arus utama sebagai “pengeras” suara Desa. Penelitian ini mencoba melihat kecenderungan pemberitaan isu desa di media lokal *online* yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Pemilihan media lokal tentu karena kedekatannya dengan desa. Sedangkan pilihan pada versi *online* lebih memungkinkan terjadinya pertarungan wacana dengan informasi yang diproduksi oleh desa itu sendiri. Penelitian ini juga menjadi bentuk konfirmasi atas asumsi komunitas desa akan kecenderungan pemberitaan media arus utama.

Penelitian ini dilakukan pada masa dimana Undang-undang ini diperjuangkan hingga akhirnya disahkan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk benar-benar mengoptimalkan fungsi media dalam mewujudkan kemandirian desa.

Media Online, Pembentukan Agenda dan Kebijakan

Keberadaan media baru mengaburkan dikotomi antara media dan khalayak. Keberadaan situs web menantang paradigma media tradisional dengan membiarkan pembaca menjadi penulis (Bentley, 2008). Media arus utama tidak lagi me-

megang otoritas tunggal dalam produksi informasi. Kondisi ini memberi peluang bagi komunitas untuk berperan dalam “pertarungan” wacana di ruang publik. Ketidakpuasan masyarakat akan representasi dan pembingkai media arus utama mendorong berkembangnya jurnalisme warga. Ide besar dibalik jurnalisme warga adalah, orang tanpa pendidikan formal mengenai jurnalisme, dapat menggunakan teknologi modern terutama perkembangan internet untuk memproduksi pesan, *fact check* secara mandiri atau bersama-sama (*sharing*) dengan yang lain. Jurnalisme warga hadir sebagai *counter* atas wacana yang dibangun oleh media arus utama.

Bowman & Willis (dalam Bruns, 2010) mendefinisikan jurnalisme warga sebagai keadaan dimana warga mempunyai peran aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis dan mendistribusikan berita dan informasi. Jay Rosen (dalam Bruns, 2010) memformulasikan bahwa jurnalisme warga digerakkan oleh orang-orang yang selama ini dikenal sebagai khalayak yang berperan aktif dalam proses jurnalisme itu sendiri. Mereka mempunyai akses dalam mengkreasi dan menyebarkan pesan yang tidak lagi bergantung pada teknologi yang selama ini “dikuasai” oleh media arus utama. Sayangnya, keberadaan media warga melalui produk jurnalisme warga belum mampu membangun wacana arus utama. Peran media arus utama tetap memegang peran dalam membangun wacana publik.

Dalam komunikasi pembangunan, media (arus utama) mempunyai peran strategis dalam mendorong perkembangan masyarakat. Pengertian paling mudah mengenai komunikasi pembangunan adalah proses untuk mengubah kondisi kehidupan melalui strategi komunikasi, praktik komunikasi, dan teknologi (Howley, 2010: 181). Pada paradigma klasik, teori komunikasi pembangunan berpijak pada model transmisi (*transmission model*). Dalam paradigma ini, media dianggap mempunyai kekuatan sebagai penyampai pesan modernisasi (Gudykunts & Mody, 2002:424). Teori media massa berpandangan bahwa media massa berperan sebagai pembuat *social consciousness* yang akan menentukan persepsi masyarakat terhadap dunia dan lingkungan sekitarnya (Hedebro, 1982: 93). Dalam paradigma baru, peran media dalam komunikasi pembangunan memang semakin lemah sebagai penyebar pesan modernisasi. Pendekatan yang dibutuhkan adalah model partisipasi (*participatory model*) atau model interaksi (*interchange model*). Tekananannya bukan saja pada komunikator yang ingin mencapai sasaran tetapi terutama kepada reaksi komunikan terhadap usul komunikator (Sulistiyowati, *et.al*, 2005: 87).

Efek media memang semakin dipertanyakan seiring dengan menguatnya asumsi keaktifan audiens dalam menerima dan mengolah pesan. Hanya saja bukan berarti bahwa kita dapat terlepas dari pengaruh media. Salah satu kekuatan media yang dianggap bertahan hingga saat ini adalah

kemampuannya dalam membentuk agenda publik (*public agenda*). Lippman menyatakan bahwa media dapat membentuk gambaran kita mengenai dunia (McCombs, 2004). Lippman sangat menyadari pentingnya media dalam menentukan cara kita berpikir. Tesis dari Lippman kemudian mengilhami berbagai ilmuwan untuk melakukan teorisasi. Salah satunya adalah teori pembentukan agenda yang dicetuskan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1968. McCombs dan Shaw meyakini bahwa ada hubungan yang kuat antara isu yang berkembang di publik dengan isu yang menjadi agenda media (McCombs, 2004).

Kekuatan media sebagai pembentuk agenda publik sangat erat kaitannya dengan *frame building*, yaitu bagaimana media memilih bingkai tertentu untuk menyajikan sebuah isu (Kim, Carvalho, dan Davis, 2010). Ide dari *news frames* merujuk pada struktur interpretasi yang digunakan oleh jurnalis untuk menceritakan suatu peristiwa dalam konteksnya yang luas. Esensi dari *framing* adalah seleksi untuk memprioritaskan fakta ataupun gambar yang secara tidak disadari akan menunjukkan kerangka interpretasi tertentu (Norris, *et.al*, 2003:10-11).

Dengan kekuatan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh media dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini didorong oleh kekuatannya yang mampu memusatkan perhatian khalayak. Menurut Tenorio (2002:87) peranan pers dalam komunikasi pembangunan adalah mempromosikan kesetaraan sosial dan isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dalam konteks ini media diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan (Sambandan, 2002:56).

Salah satu elemen yang menjadi indikator sebuah komunitas berdaya adalah mereka dapat mengendalikan representasi dirinya di hadapan khalayak luas. Dengan melihat kekuatan yang masih dimiliki oleh media arus utama, perlu elaborasi lebih lanjut mengenai sinergi antara media rakyat (media komunitas) dengan media arus utama dalam melakukan *mainstreaming* wacana desa. Merujuk pada kerangka pikir diatas, media arus utama diposisikan sebagai penguat wacana yang diproduksi oleh desa. Dengan demikian, kekuatan desa untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan publik semakin besar.

Metode Penelitian

Untuk membedah sejauh mana peran media lokal *online* dalam mengarusutamakan wacana desa, penelitian ini melihat dari dua elemen. Pertama, isi berita yang menjadi output dari media lokal tersebut. Kedua, kebijakan redaksional sebagai bentuk konfirmasi atas isi berita. Dalam membedah dua elemen tersebut, peneliti menggunakan metode studi kasus. Pemilihan metode ini berdasarkan kemampuannya dalam menangkap fenomena empirik, kontemporer, dan kesempatan penggalian bukti-bukti dari berbagai sumber (Yin, 2004). Metode ini memberikan fleksibili-

tas peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan variasi metode pengumpulan. Selain itu, metode ini mampu mengejar kedalaman dan keunikan suatu fenomena untuk kemudian direfleksikan dalam konteks yang lebih luas.

Peneliti mengambil kasus di wilayah Kabupaten Banyumas karena wilayah ini merupakan basis dari “Gerakan Desa Membangun”, dimana perkembangan media komunitas dan media lokalnya yang sangat dinamis. Peneliti memilih dua media lokal *online* terkemuka di wilayah tersebut, yaitu, Radar Banyumas (www.radarbanyumas.co.id), dan Satelit Post (www.satelitnews.co). Kedua media ini merupakan media lokal dengan oplah tertinggi dan populer di kalangan masyarakat setempat. Peneliti mengamati dan menggali informasi terkait proses produksi pesan beserta produk beritanya dalam rentang waktu antara Maret 2013 hingga Maret 2014.

Penelitian ini fokus pada tiga aspek. Pertama, konsistensi dalam pemberitaan isu terkait dengan desa. Konsistensi ini dilihat dari kuantitas berita tentang desa yang muncul dalam rentang waktu penelitian (Maret 2013-Maret 2014) di masing-masing media lokal *online*. Konsistensi ini juga dilihat dari ada tidaknya kebijakan redaksional yang menjamin kuota ataupun menentukan konten desa dalam media online mereka.

Kedua, kecenderungan isu berita yang diliput oleh media lokal *online*. Kecenderungan ini dilihat dari tiga unit analisis, yaitu isi berita, bidang berita, dan aspek berita. Ketiga hal ini digunakan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan asumsi dari komunitas desa mengenai kecenderungan pemberitaan media arus utama. Kecenderungan ini kemudian dikonfirmasi kepada pihak redaksi untuk membedah pertimbangan ataupun kebijakan dalam menentukan isu desa yang diunggah dalam portal online mereka. Ketiga, posisi desa dalam pemberitaan. Aspek ketiga ini digunakan untuk melihat bagaimana media lokal memandang komunitas desa. Lebih jauh, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai posisi desa dalam pemberitaan tersebut. Posisi desa dilihat dari empat unit analisis, yaitu (1) objek berita, (2) tempat peristiwa berita, (3) pemilihan sumber berita, dan (4) penempatan desa sebagai objek atau subjek dalam setiap isu, baik potensi maupun masalah.

Ada dua tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk membedah tiga aspek tersebut. Pertama, melakukan analisis isi kualitatif untuk memetakan representasi komunitas desa dalam media arus utama. Analisis isi merupakan metode yang lahir dari paradigma positivisme yang sifatnya objektif, sistematis, dan merupakan deskripsi kuantitatif atas konten manifes dari komunikasi (Berelson, 1952; Krippendorff, 1980:21). Sedangkan menurut Holsti (1969:13-15), analisis isi adalah prosedur untuk menarik kesimpulan tentang pertukaran pesan komunikasi. Dalam perkembangannya, metode ini digunakan dalam kerangka yang lebih interpretif. Sifat kualitatifnya memungkinkan peneliti melihat dengan lebih dalam

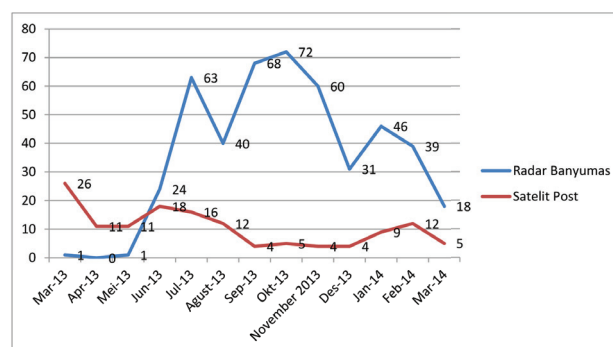
terkait konten pesan yang tersirat dalam teks, dengan tetap berusaha mempertahankan kerangka sistematis yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua, melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memahami kebijakan redaksional terkait pemberitaan informasi desa. Metode ini dipilih karena kekuatannya dalam menggali data. Dari hasil elaborasi dua metode diatas, peneliti melakukan pemetaan terkait dengan peran media lokal tersebut. Ke depan, hasil penelitian ini akan menjadi pijakan untuk menggali lebih dalam mengenai sinergitas antara jurnalis media lokal dengan masyarakat sebagai jurnalis warga.

Kecenderungan Isu Desa dalam Pemberitaan Media Lokal Online

Objek primer dari penelitian ini adalah berita yang terunggah dalam dua surat kabar lokal *online* yang berbasis di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu Radar Banyumas dan Satelit Post, dalam rentang waktu 1 tahun (Maret 2013 -Maret 2014). Dari proses seleksi ditemukan setidaknya 600 berita yang memuat isu desa, dengan rincian 463 berita (77,2%) termuat di Radar Banyumas dan 137 (22,8%) berita termuat di Satelit Post. Data tersebut menunjukkan bahwa Radar Banyumas lebih banyak melirik isu Desa dibandingkan dengan Satelit Post. Perbedaannya cukup signifikan, dengan perbandingan mencapai 1:3.

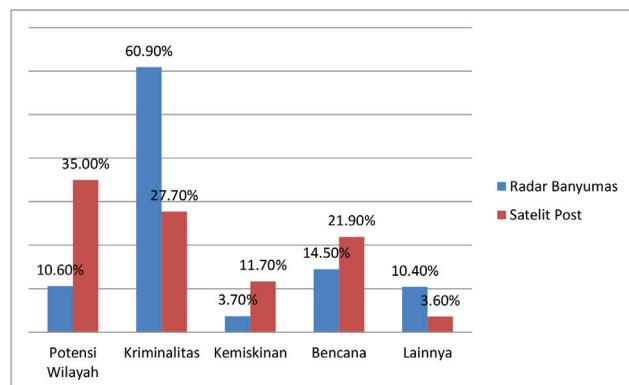
Kuantitas berita mengenai isu desa yang terunggah selama rentang waktu 1 tahun ternyata masih sangat minim. Di samping perbedaan yang mencolok antara kedua portal tersebut, jika dirata-rata, dalam 13 bulan tersebut, hanya ada sekitar 46 berita terunggah setiap bulan. Jika dirata-rata perhari, tidak sampai 2 berita yang terunggah dalam kedua portal. Artinya, ada hari-hari di mana isu desa tidak muncul di salah satu portal atau bahkan kedua portal tersebut. Fluktuasi ini menunjukkan belum ada konsistensi pemberitaan isu desa, disamping jumlahnya yang masih minim.



Gambar 1. Konsistensi Pemberitaan

Selain inkonsisten dalam memberitakan isu desa, media lokal juga masih terperangkap pada citra negatif desa. Kegelisahan komunitas desa yang menganggap bahwa media arus utama

lebih melirik isu negatif terkonfirmasi dari data yang ditemukan dalam penelitian ini. Sebanyak 79,2% dari 463 berita yang terunggah dalam Radar Banyumas, bercerita tentang ketiga isu yang selama ini digelisahkan, yaitu kriminalitas, bencana, dan kemiskinan. Dari ketiga isu tersebut, kriminalitas menjadi primadona, yaitu mencapai 60,9%. Jumlah ini berbanding terbalik dengan pemberitaan mengenai potensi desa yang hanya 10,6% atau sekitar 14 berita dalam rentang waktu 13 bulan.

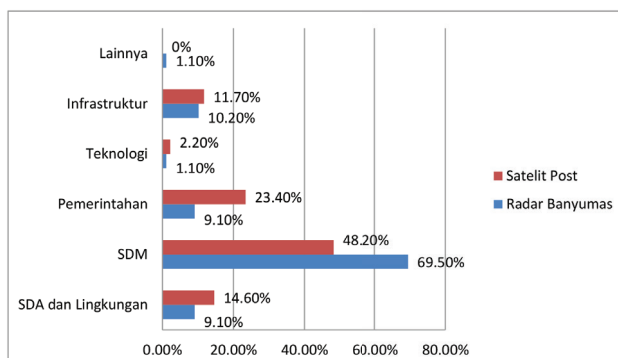


Gambar 2. Kecenderungan Isu Berita

Kecenderungan Radar Banyumas dalam pemberitaan isu desa sedikit berbeda dengan Satelit Post. Meskipun dari segi jumlah hanya 1/3 dari Radar Banyumas, proporsi untuk berita mengenai potensi desa lebih tinggi yaitu mencapai 35%. Hanya saja, angka ini tidak cukup menggembirakan karena proporsi untuk tiga masalah yang terjadi di desa secara akumulatif lebih tinggi, yaitu mencapai 61,3%. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa Satelit Post lebih peka terhadap potensi wilayah Desa dibanding Radar Banyumas.

Dalam melihat kecenderungan berikutnya, penelitian ini menyorot tentang bidang pemberitaan yang menjadi favorit masing-masing surat kabar lokal *online*. Bidang tersebut dibagi menjadi lima, yaitu (1) Sumber Daya Alam yang mencakup bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan isu lingkungan seperti penghijauan, isu air, udara, maupun tanah; (2) Sumber Daya Manusia yang mencakup tentang isu pendidikan, kependudukan, tenaga kerja, lapangan kerja, kesehatan, budaya, kesenian, dll; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup tentang isu kebijakan, anggaran, rencana pembangunan, dll; (4) Teknologi yang mencakup isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik TIK maupun TTG; dan (5) Infrastruktur, yaitu mencakup isu berkaitan dengan keberadaan dan ketersediaan infrastruktur. Berita yang tidak memuat kelima bidang tersebut dikategorikan dalam bidang lainnya.

Dari olah data yang telah dilakukan, Sumber Daya Manusia menjadi bidang primadona bagi kedua surat kabar. Jumlah berita yang bercerita tentang isu ini mencapai 69,5% pada Radar



Gambar 3. Kecenderungan Bidang Berita

Banyumas dan 48,2% pada Satelit Post. Sedangkan empat bidang lain jumlahnya cukup variatif di masing-masing surat kabar. Bidang lain yang menjadi primadona di Radar Banyumas selain isu SDM adalah isu Infrastruktur, yaitu 10,2%. Kemudian disusul oleh isu SDA dan lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan, masing-masing 9,1%. Sedangkan isu mengenai teknologi dan lainnya jumlahnya dibawah 5%. Hal ini senada dengan Satelit Post yang sangat minim mengangkat isu tentang teknologi dan lainnya. Hanya saja, berbeda dengan Radar Banyumas, Satelit Post lebih banyak mengangkat isu Tata Kelola Pemerintahan (23,4%) dan SDA Lingkungan (14,6%) dibandingkan dengan infrastruktur (11,7%).

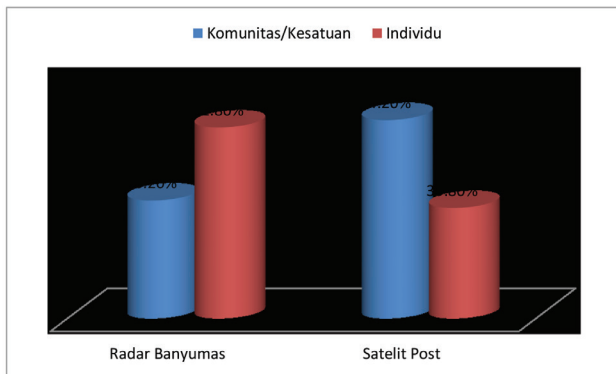
Lebih lanjut mengenai aspek berita, Radar Banyumas lebih banyak menekankan pada aspek Sosial Budaya (62%) dibandingkan dengan aspek ekonomi (28,1%) maupun politik (2,8%). Sedangkan Satelit Post lebih banyak menekankan pada aspek ekonomi (46%) dibandingkan dengan aspek sosial budaya (38%) dan politik (9,5%). Kecenderungan yang sama di kedua surat kabar adalah minimnya berita bersudut pandang politik yang jumlahnya dibawah 10%, bahkan Satelit Post proporsi untuk berita desa dengan aspek politik hanya 2,8% saja. Data ini menunjukkan bahwa isu desa masih kuat dikaitkan dengan aspek sosial budaya maupun ekonomi. Isu desa jarang dikaitkan dengan aspek politik.

Posisi Desa dalam Pemberitaan Media Lokal Online

Aspek berikutnya yang dielaborasi dalam penelitian ini adalah posisi desa dalam pemberitaan. Aspek ini sangat penting untuk melihat bagaimana media arus utama memandang dan memposisikan desa dalam setiap pemberitaannya. Ada setidaknya empat unit analisis yang digunakan untuk membedah aspek ini, yaitu (1) objek berita, (2) tempat peristiwa berita, (3) pemilihan sumber berita, dan (4) penempatan desa sebagai objek atau subjek dalam setiap masalah atau potensi yang diangkat.

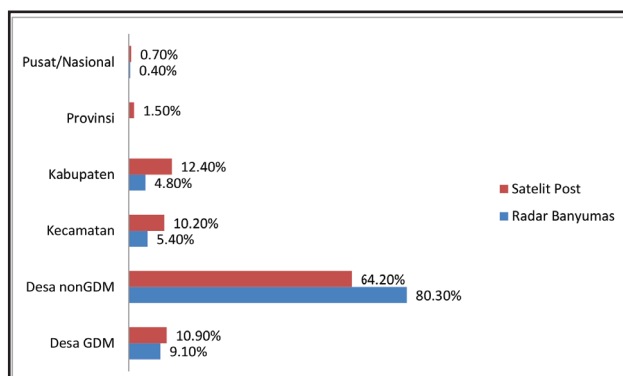
Objek berita dibedakan menjadi dua, yaitu individu dan komunitas. Berita dikategorikan ber-objek individu jika objeknya adalah warga desa

sebagai individu. Hal ini berbeda dengan berita yang berobjek komunitas dimana objeknya adalah desa sebagai komunitas, seperti kelompok petani, pemerintah desa, Lembaga Desa, dll. Dari hasil olah data yang dilakukan, ada kecenderungan bertolak belakang antara kedua surat kabar lokal *online*. Di satu sisi Radar Banyumas lebih banyak melihat Desa sebagai individu (61,8%) sedangkan Satelit Post lebih banyak melihat Desa sebagai komunitas (64,2%).



Gambar 4. Kecenderungan Objek Berita

Level peristiwa berita dikategorikan menjadi enam kategori, yaitu (1) Desa yang masuk dalam Gerakan Desa Membangun; (2) Desa yang tidak masuk dalam Gerakan Desa Membangun; (3) Level Kecamatan; (4) Level Kabupaten; (5) Level Propinsi; dan (6) Level Pusat/Nasional. Dari hasil olah data didapatkan kecenderungan yang mengembirakan karena sebagian besar, lebih dari 70%, peristiwa yang diberitakan terjadi di desa. Sayangnya, lebih banyak yang justru terjadi di desa non GDM. Artinya, tidak ada hubungan antara aktivitas dan dinamika GDM dengan pemberitaan yang muncul di media arus utama.



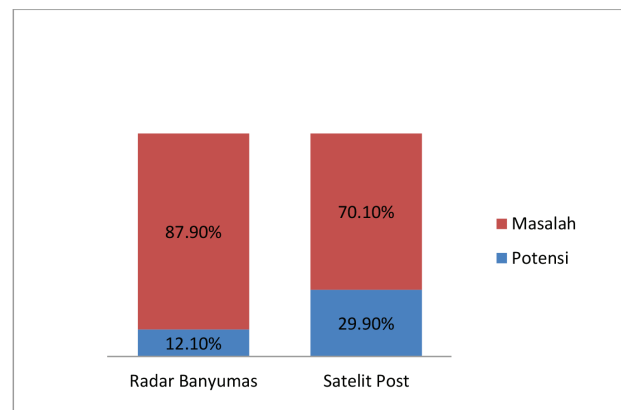
Gambar 5. Kecenderungan Level Peristiwa Berita

Dalam kedua surat kabar lokal *online*, warga masyarakat menjadi narasumber yang cukup diperhitungkan, baik sebagai narasumber tunggal (19% di Radar Banyumas dan 21,9% di Satelit

Post), ataupun dikombinasikan dengan narasumber lain. Variasi yang sangat dominan adalah narasumber warga masyarakat disandingkan dengan saluran informasi formal (pemerintah mulai level desa hingga nasional), yaitu mencapai 36,5% baik di Radar Banyumas maupun Satelit Post.

Disamping warga masyarakat, pihak yang sering menjadi narasumber di kedua surat kabar adalah pemerintah kabupaten, yaitu mencapai 11% di radar Banyumas dan 10,2% di satelit Post. Sedangkan pemerintah desa belum menjadi narasumber yang cukup diperhitungkan, baik narasumber tunggal maupun dilengkapi dengan narasumber lainnya. Pasalnya berita yang memuat pernyataan ataupun data dari pemerintah desa hanya 3,9% di Radar Banyumas. Sedangkan di Satelit Post relatif lebih tinggi yaitu mencapai 14,6%, dimana 6,6% menjadi narasumber tunggal dan 8% divariasikan dengan pejabat di level atasnya.

Aspek lain yang diteliti adalah penempatan desa dalam fokus berita, apakah ditempatkan sebagai objek atau subjek. Sebelum melihat penempatan tersebut, peneliti melihat fokus berita terlebih dahulu. Fokus berita merupakan pilihan wartawan untuk memilih bagian dari suatu isu, apakah bercerita tentang sisi positif (potensi) atau sisi negatif (masalah). Dari hasil olah data yang telah dilakukan, kedua surat kabar mempunyai kecenderungan yang hampir sama, di mana keduanya lebih banyak memilih sisi negatif dari suatu isu dibandingkan memberitakan tentang potensi dari suatu isu. Namun, jika dicermati lebih jauh dari sisi positif, Satelit Post yang *notabene* secara kuantitas jauh lebih sedikit, justru memberikan proporsi yang lebih besar untuk berita terkait potensi dibandingkan dengan masalah.

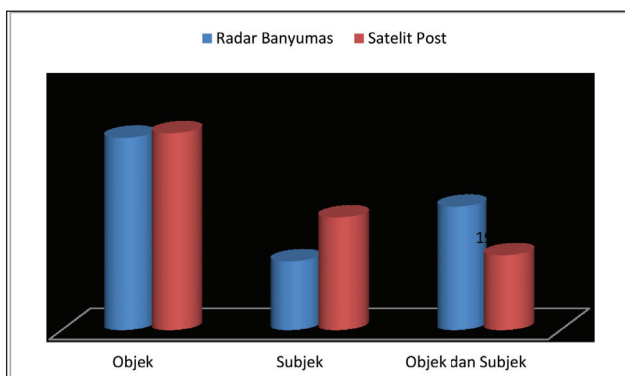


Gambar 6. Kecenderungan Fokus Berita

Pada tahap selanjutnya, peneliti melihat lebih jauh mengenai kecenderungan berita terkait dengan potensi. Radar Banyumas memuat berita bernada positif sebanyak 56 berita (12,1%) dalam rentang waktu 13 bulan. Sedangkan Satelit Post

memuat berita dengan proporsi yang lebih banyak, yaitu 29,9% meskipun secara kuantitas lebih sedikit, yaitu hanya 41 berita. Dari 97 berita tersebut, peneliti melakukan analisis lebih lanjut mengenai posisi Desa dalam pengembangan potensi, apakah ditempatkan sebagai subjek yang mempunyai kontribusi aktif dalam pengembangannya atau hanya ditempatkan sebagai objek pasif penerima manfaat.

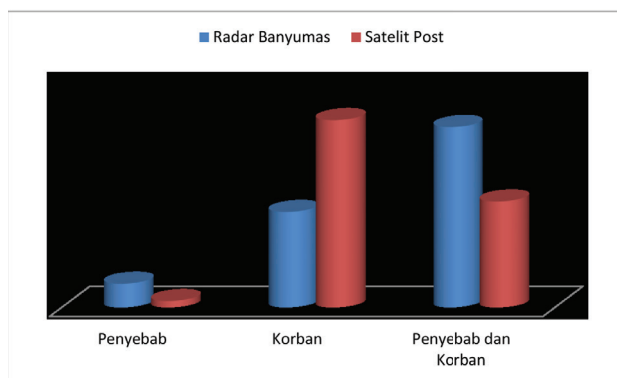
Dari hasil olah data yang dilakukan, hasilnya tidak berbeda dengan asumsi awal dari penelitian ini, dimana desa dipandang sebagai komunitas inferior yang cenderung pasif. Desa belum dipandang sebagai komunitas yang mampu aktif dalam pengembangan potensi wilayahnya. Hal ini dikuatkan dengan data bahwa lebih dari 50% berita di kedua surat kabar menempatkan desa sebagai objek. Meskipun demikian, masih ada harapan pada Satelit Post dimana memposisikan desa sebagai subjek lebih banyak dibandingkan dengan Radar Banyumas. Sedangkan Radar Banyumas lebih banyak memvariasikan posisi desa sebagai objek maupun subjek dibandingkan dengan menegaskan posisi desa sebagai subjek.



Gambar 7. Posisi Desa dalam Potensi

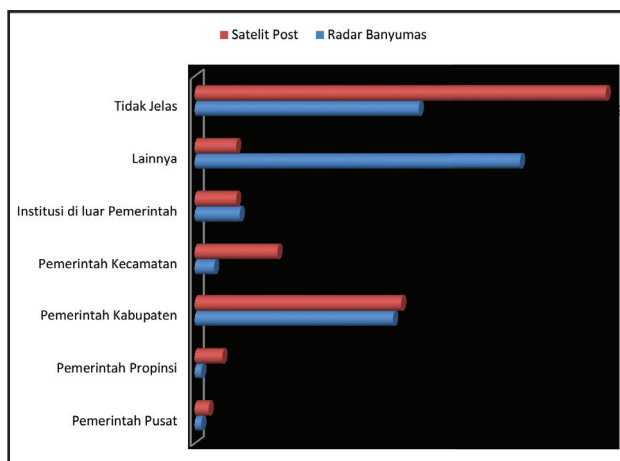
Selain melihat kecenderungan lebih jauh pada berita yang bernada positif, penelitian ini juga melihat lebih jauh pada berita bernada negatif. Pengkategorian sama, yaitu pilihan untuk menempatkan desa sebagai objek atau subjek. Harapannya berkebalikan dengan kecenderungan pada berita potensi, dimana Desa diharapkan tidak banyak diposisikan sebagai penyebab (subjek) melainkan korban (objek). Hasilnya cukup menggembirakan meskipun tidak sepenuhnya. Dari 87,9% berita bernada negatif (407 berita) di Radar Banyumas, 31,9% menempatkan Desa sebagai korban. Begitu juga di Satelit Post, dari 96 berita (70,1%) dari berita bernada masalah, 62,5% juga menempatkan desa sebagai korban. Sedangkan berita yang menempatkan desa sebagai penyebab saja hanya 8% di Radar Banyumas dan 2,1% di Satelit Post.

Hanya saja, angka ini belum dapat dikatakan bahwa Desa benar-benar ditempatkan sebagai korban saja dalam permasalahan tersebut. Ada



Gambar 8. Posisi Desa dalam Masalah

pilihan ketiga, yaitu kecenderungan untuk menempatkan Desa sebagai penyebab sekaligus korban dalam isu tersebut. Berita dalam kategori ini jumlahnya sangat signifikan. Bahkan, di Radar Banyumas berita yang masuk dalam kategori ketiga ini mendominasi, yaitu mencapai 60,2%. Sedangkan di Satelit Post mencapai 35,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa desa, selain dianggap pasif dalam pengembangan potensi juga dianggap cenderung menjadi penyebab sekaligus korban dari permasalahan. Bahkan, jika desa dianggap sebagai korban, pihak yang dianggap bertanggung jawab cenderung tidak jelas. Media belum mampu untuk melakukan *diagnosing causes* terhadap permasalahan yang menimpa desa. Dari data sebelumnya dipaparkan bahwa ada 130 berita (31,9%) di Radar Banyumas dan 60 berita (62,5%) yang mempunyai kecenderungan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak secara jelas mampu menunjukkan pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan dari pihak instansi pemerintahan yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten.



Gambar 9. Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Masalah

Posisi Media Lokal dalam Pemberitaan Isu Desa

Setelah melakukan analisis isi kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak redaksi kedua media lokal *online* tersebut. Dari wawancara mendalam yang dilakukan

kepada pihak redaksi, Satelit Post sebenarnya mempunyai *concern* yang cukup baik terhadap isu desa. Pasalnya, pihak Satelit Post menyadari posisinya sebagai media lokal. Targetnya, 75% dari keseluruhan konten adalah berita lokal sedangkan sisanya adalah berita nasional ataupun internasional. Namun, hingga pertengahan tahun 2014 target tersebut belum tercapai. Pasalnya, jumlah reporter masih sangat terbatas. Di wilayah Banyumas sendiri hanya ada 6 reporter yang bertugas, dimana 4 reporter bertugas di Kota Purwokerto dan 2 reporter bertugas untuk mengkover berita yang berasal dari kecamatan ataupun desa. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan.

Untuk mengimbangi kelemahan tersebut, pihak redaksi mempunyai inisiatif untuk membuka rubrik “Jurnalisme Warga”. Rubrik ini merupakan bentuk peran aktif Satelit Post dalam memberikan ruang bagi masyarakat, terutama desa, untuk berbagi informasi melalui media arus utama. Hanya saja memang tidak semua tulisan dari warga bisa masuk atau terunggah dalam portal berita. Berita atau tulisan yang masuk tetap diseleksi oleh *Editor Online* dengan mempertimbangkan kelayakan tulisan dan nilai berita. Selain itu, ada skala prioritas masalah yang juga menjadi pertimbangan Redaktur dalam mengakomodasi berita dari Warga. Jika memang baik maka akan diunggah dan bahkan akan ditelusuri lebih dalam untuk menjadi berita utama. Hal ini menjadi bentuk kerjasama antara jurnalis media lokal dengan para jurnalis warga.

Kondisi serupa dialami oleh Radar Banyumas. Pihak redaksi menyadari posisinya sebagai media lokal *online*, dimana berita lokal menjadi poin utama dibandingkan dengan berita nasional. Redaksi mengaku cukup *concern* dengan isu Desa. Bahkan redaksi sempat memberikan rubrik khusus bernama “Otonomi Desa” untuk memberikan ruang bagi desa memberitakan kondisi wilayahnya. Hanya saja memang hanya berjalan beberapa tahun saja. Pada saat penelitian dilakukan rubrik tersebut sudah tidak ada. Pihak redaksi menyampaikan bahwa informasi dari desa masih minim. Tidak banyak desa yang aktif mengirimkan informasinya.

Jumlah reporter yang terbatas juga menjadi kendala koverasi isu desa yang *notabene* luas wilayahnya. Hanya ada satu reporter yang ditempatkan untuk mengkover isu di wilayah pinggiran. Sayangnya, pemberitaannya masih bersifat spontan. Belum ada agenda terstruktur dalam mengolah isu desa. Disamping itu, dari pengakuan pihak redaksi, portal *online* belum menjadi fokus garapan. Versi *online* hanya sebagai pendamping saja. Sehingga pemberitaan yang terunggah dalam portal *online* tidak selengkap yang mereka terbitkan dalam media cetak.

Berkaitan dengan pembimbingan yang dilakukan oleh media mengenai isu desa, hingga saat

penelitian dilakukan, tidak ada kebijakan yang secara eksplisit menunjukkan *concern* pada isu tertentu. Peliputan tentang desa masih bersifat spontan. Belum ada perencanaan yang terstruktur untuk fokus mengangkat isu tertentu. Disamping itu, benturan dengan nilai berita menjadi alasan mengapa berita mengenai kriminalitas, bencana, dan hal negatif lainnya lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan potensi. Dalam konteks ini formula *bad news is good news* masih digunakan oleh media lokal di wilayah Kabupaten Banyumas tersebut. Hanya saja, menurut penuturan para redaktur, formula tersebut tidak lagi sepenuhnya digunakan. Jika memang ada berita bagus dan mempunyai nilai berita maka akan tetap diunggah. Formula *bad news is good news* sudah mulai dikembangkan meskipun belum terlihat signifikan.

Pertimbangan dari redaksi lebih pada kekuatan nilai berita dan skala prioritas permasalahan atau isu yang diangkat. Menariknya, menurut penuturan redaktur, seringkali ada perbedaan persepsi antara jurnalis dengan masyarakat ataupun jurnalis warga. Bagi komunitas desa suatu isu bisa dianggap menarik karena berkaitan dengan eksistensi desa. Namun, isu tersebut belum tentu mempunyai nilai berita seperti yang selama ini menjadi acuan dari para jurnalis. Menyikapi perbedaan tersebut, redaksi media lokal berharap para jurnalis warga ataupun masyarakat secara umum belajar memahami logika media. Mereka merekomendasikan adanya sinergi berupa pembelajaran jurnalistik kepada para jurnalis warga untuk kemudian mampu mengambil *angle* dan membuat *frame* yang sesuai dengan standar nilai berita media arus utama.

Sedangkan mengenai kecenderungan posisi desa dalam pemberitaan, redaksi menjelaskan mekanisme peliputan isu desa. Biasanya reporter lapangan yang berada di desa atau kecamatan akan mencoba untuk mencari data primer terkait dengan suatu permasalahan. Kemudian, data tersebut dikonfirmasi oleh reporter yang bertugas di kota kepada para pemegang kebijakan. Dengan pertimbangan bahwa para pemegang kebijakan itu adalah pihak yang berwenang untuk melakukan konfirmasi terhadap suatu isu. Itulah sebabnya mengapa pemerintah kabupaten menjadi narasumber yang cukup dominan dalam pemberitaan isu desa. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman mengenai desa sebagai komunitas yang mandiri. Angin segarnya adalah media lokal mulai menyadari otoritas desa sejak disahkannya UU Desa. Media lokal, terutama Satelit Post mempunyai rencana untuk menjadi UU Desa sebagai fokus pemberitaan tentang desa. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi sekaligus mengakomodir kepentingan desa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam masyarakat digital, informasi menjadi sumber daya vital yang menggerakkan masyarakat. Hal ini memposisikan media (arus uta-

ma) sebagai entitas yang sangat strategis dalam menentukan arah pergerakan tersebut. Meskipun saat ini kontrol informasi tidak lagi dimonopoli, kekuatan media dalam membentuk agenda publik tidak serta merta tergantikan. Media masih mempunyai kekuatan untuk membingkai suatu peristiwa dengan menonjolkan suatu hal dan menghilangkan hal lainnya.

Di satu sisi, kekuatan ini membantu masyarakat untuk menentukan prioritas permasalahan. Disisi lain, media juga dapat menyebabkan isu yang sebenarnya krusial menjadi tidak muncul. Salah satunya adalah isu tentang Desa. Desa merupakan entitas penting di Indonesia. Sayangnya, dari hasil penelitian ini, peran media arus utama dalam menguatkan wacana desa belum dapat dikatakan signifikan. Pasalnya, konsistensi atas isu desa masih sangat minim. Disamping itu, isu yang dikembangkan dalam media arus utama lebih banyak bernada negatif. Akibatnya, desa semakin diidentikkan dengan masalah, bukan potensi. Padahal, dalam konteks pemberdayaan, menonjolkan potensi adalah penting untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jika kemudian perhatian publik hanya terpusat pada masalah Desa maka bukan tidak mungkin desa menjadi komunitas yang semakin termarginalkan.

Ketakutan ini kemudian dipertegas dengan kecenderungan bagaimana media lokal *online* memposisikan desa. Dalam 600 pemberitaan yang menjadi objek penelitian ini, desa lebih banyak ditempatkan sebagai objek dari berbagai program pembangunan alih-alih ditempatkan sebagai subjek yang aktif mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini juga dapat dilihat dari pemilihan narasumber dimana komunitas desa tidak diberikan tempat yang strategis. Suara pemerintah daerah masih menjadi primadona yang menjadi dasar pembingkai media. Meskipun penelitian ini

memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan, tidak berarti kondisi ini tidak dapat diperbaiki. Media lokal mengakui kelemahan tersebut dan mempunyai iktikad baik untuk meningkatkan perannya dalam memberdayakan komunitas desa. Terlebih pasca disahkannya UU Desa nomor 6 tahun 2014, yang memberikan otonomi kepada desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk benar-benar mengoptimalkan fungsi media dalam mewujudkan kemandirian desa. Penelitian ini setidaknya menghasilkan sebuah rekomendasi untuk mengoptimalkan peran media lokal *online* dalam mengarusutamakan wacana desa. Perlu sinergitas antara desa dengan Media dalam membangun wacana yang positif tentang desa. Peluangnya, meskipun dalam produk yang dihasilkan oleh media belum mencerminkan sinergitas tersebut, ada komitmen yang diutarakan oleh redaksi untuk lebih memperhatikan Desa dalam pemberitaannya.

Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan menginisiasi sebuah forum yang mempertemukan dua elemen tersebut. Dalam forum tersebut, media berkewajiban untuk memberikan edukasi jurnalistik terhadap warga masyarakat. Tekanannya adalah pada pemahaman terkait nilai berita. Dengan rangkaian edukasi tersebut diharapkan para jurnalis warga mampu memproduksi informasi yang mempunyai nilai berita. Sehingga, media lokal menjadi lebih mudah untuk mengakomodir informasi tersebut. Disamping itu, dalam forum tersebut, komunitas desa juga perlu memberikan edukasi kepada media lokal mengenai isu krusial yang menyangkut desa. Tekanannya adalah pada otoritas desa sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, media tidak lagi memarginalkan suara desa.

Daftar Pustaka

- Bentley, C. H. (2008). Citizen Journalism: Back to the Future? http://citizenjournalism.missouri.edu/researchpapers/bentley_cj_carne-gie.pdf Diunduh tanggal 3 Juli 2011.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. New York: Hafner Press.
- Bowman, S. & Willis, C. (2003). We Media: How Audiences are shaping the Future of News and Information. http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf. Diunduh tanggal 3 Juli 2011.
- Bruns, A. (2010). News Produsage in a Pro-Am Mediasphere: Why Citizen Journalism Matters. Dalam Meikle, G & Redden, G. (ed). *News Online: Transformations and Continuities*. London: Palgrave Macmillan.
- Gudykunst, W. B. & Bella, M. (2002). *Handbook of International and Intercultural Communication*. Second Edition. California: Sage Publications.
- Hedebrø, G. (1982). *Communication and Social Change in Developing Nations: A Critical View*. Iowa: The Iowa State University Press.
- Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Massachusetts: Addison Westle.
- Howley, K. (ed). (2010). *Understanding Community Media*. New York: Sage Publications.
- Kim, S., Carvalho, J.P. & Davis, A.G. (2010). Talking About Poverty: News Framing of Who is Responsible for Causing and Fixing the Problem. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 87 (3-4), 563-581
- Krippendorff, K. (1980). *Content Analysis : An Introduction to it's methodology*. Newbury Park: Sage Publications.
- Lindawati, L. (2013). Desa Bersuara: Studi Kasus Praktik Jurnanisme Warga dengan Memanfaatkan Media Baru di Wilayah Banyuwangi tahun 2012-2013 sebagai Upaya Mendorong Desa Bersuara dalam New Media dan Arus Demokratisasi. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- McCombs, M. (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Cambridge: Polity Press.
- Norris, P., Kern, M. & Just, M. (2003). *Framing Terrorism: The News Media, the Government, and the Public*. New York: Routledge.
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sambandan, V.S. (2002). Trapped in Images and Events: Poverty and the Media in India dalam Puri, A. (ed). *Poverty in Asia: Media Challenges and Responses*. Nanyang: AMIC, SCI dan NTU.
- Sulistiyowati, F., Setyowati, Y. & Wuryantono, T. (ed). (2005). *Komunikasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: APMD Press.
- Tenorio, A. S. (2002). The Philippine Press and Poverty: The Lessons of Edsa Three. Dalam Puri, A. (ed). *Poverty in Asia: Media Challenges and Responses*. Nanyang: AMIC, SCI dan NTU.
- Yin, R. K. (2004). *Case Study Research: Design and Methods*. London: Sage Publications.